

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Fitriani. Rini, 2016, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Deepublis.
- Iskandar. Mizaj dan EMK Alidar, 2020, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Jamaluddin, et al., 2016, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jamaluddin, et al., 2019, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lesmana, Andi dan Munawir, 2023, *Hukum Adat: Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat*, Aceh: Widina.
- Majelis Adat Aceh, 2012, *Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh.
- Mertokusumo. S, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Narbuko. Chalid dan Sri Mamudji, 2007, *Buku Panduan Akademik, Metode Penelitian*, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Nurdin. Mulyadi, 2022, *Wewenang Gampong dan Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Mohandis.
- Soekanto. S, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV, Bandung: Alfabeta.

Setiady. Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung: Alfabeta.

Yamin. Mohammad, et al., 2018, *Peradilan Adat dan Masyarakat Hukum Adat*, Uns Press.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Pemerintah *Mukim* di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159-179.

A. M. Resad; Satjipto Rahardjo, supervisor; Mardjono Reksodiputro, supervisor, Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok, *Jurnal Universitas Indonesia Library*, viii (1985), 266.

Baddruzzaman Ismail, 2015, Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh). Edisi ke-2. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

- Chairul Musafira, 2023, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6 No. 2.
- Eva Achyani Zulfa, 2013, Keadilan Restoratif, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta, 2009. Ahmad Ubbe, Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2.
- Fauzi, A, 2019, Sistem Peradilan Adat dan Implementasinya di Aceh, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19 No.2.
- Habibullah, Multazam, 2021, Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Hakim Nyak Pha, 2015, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, Majalah Jemala, Nomor XVI.
- Hulman Panjaitan, 2016, Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, 413.
- I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, I Gst Ngr Dharma Laksana, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Jamhir, 2016, Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh, Jurnal Justisia, Vol. 1. No.1. e.
- Kusumah, 2020, Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Positif, Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia, Vol. 6 No.1.
- Manfarisyah et al., 2015, A Procedure of Dispute Resolution at Village Adat Institution in Seunudon Sub-District of North Aceh Regency, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 35.
- Manfarisyah et al., 2018, The Participation of Women in the Village Adat Justice: the Regulations and Its Implementations in North Aceh Regency, Journal of Law, Indian Journal of Public Health Research & Development, Vol. 9.

- Muksalmina, dan Elidar Sari, 2023, Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Jurnal Suloh, Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, Vol. 11 No. 2.
- M. Resad; Satjipto Rahardjo, supervisor; Mardjono Reksodiputro, supervisor, dalam beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok, Jurnal Universitas Indonesia Library, viii (1985), 266.
- Siti Thali'ah Athina et al., 2019, Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Pada Tingkat *Mukim* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 4.
- Sofyan, Sulaiman, Manfarinsyah, 2022, Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, Suloh: jurnal Fakultas Hukum Universitas malikussaleh, Vol. 10 No. 1.
- Sundberg, Juanita. Indigenous Peoples' Customary Law and the Inter-American Court of Human Rights, The International Journal of Human Rights 14, no. 6 (2010): 893-913.